

## STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Pratiwi & Aylar Beniah Ndraha**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

tiwi2untri@yahoo.com.

### *ABSTRACT*

*Samarinda always plagued by the problem of flooding to date, coverage of the flood are still scattered throughout the city to the need for flood control improvement strategy in Samarinda so that the flooding problems can be solved.*

*This reasearch intends to formulate a strategy of flood control in the city of Samarinda using the theory of the strategy proposed by Bryson, with a qualitative descriptive approach. Data collection through interviews and documentation.*

*Research strategies for improving flood control and consists of 8 issues very strategic, strategy builds on the commitment of government, private and public, a strategy utilizing the budget is significant in accelerating overcome the flooding problems, a strategy the need for the participation of communities, LSM, and the world effort in preparing to with the implementation of the program of flood control, revitalization strategy and relocating settlements on a river bank Karangmumus, strategies completion of land acquisition and social problems, a sustainability strategy implementation program of flood control, the development strategy of normalization of the drainage channel in Samarinda, strategies for improving operation and maintenance of facilities and flood control infrastructure*

**Keywords:** *strategy, flood control, coverage, bulk, is undermined, drainage, revitalizing, LSM.*

### **ABSTRAK**

Kota Samarinda selalu didera masalah banjir hingga saat ini, cakupan wilayah banjir masih tersebar di seluruh Kota untuk itu diperlukannya strategi peningkatan pengendalian banjir di Kota Samarinda agar permasalahan banjir dapat diatasi.

Penelitian ini bermaksud untuk merumuskan strategi pengendalian banjir di Kota Samarinda dengan menggunakan teori mengenai strategi yang dikemukakan oleh Bryson, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian strategi peningkatan pengendalian banjir yaitu terdiri dari 8 isu yang sangat strategis yaitu strategi membangun komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat, strategi memanfaatkan Anggaran yang cukup besar dalam mempercepat mengatasi permasalahan banjir, strategi diperlukannya partisipasi masyarakat, LSM, dan dunia usaha dalam menyusun sampai dengan implementasi program pengendalian banjir, strategi revitalisasi dan merelokasi pemukiman bantaran Sungai Karangmumus, strategi penuntasan pembebasan lahan dan permasalahan sosial, strategi keberlanjutan implementasi program pengendalian banjir, strategi pembangunan normalisasi saluran

drainase (*Review Design*) dalam Kota Samarinda, strategi peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Kata kunci: strategi, pengendalian banjir, jangkauan/cakupan, jumlah besar, dirusak, drainase, revitalisasi, LSM.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan dengan melihat seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari pembangunan nasional ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan amanat UUD 1945 maka sudah semestinya kita mengupayakan pencapaian dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan membawa tanggung jawab yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah dengan pembaharuan dan pengawasan perlu terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan, satu di antaranya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan fisik pengendalian banjir di Kota Samarinda.

Seiring dengan itu juga Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda

yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dituntut untuk lebih tanggap melindungi dan melayani kepentingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah seutuhnya, memerhatikan kondisi sarana pengendalian banjir, saluran drainase, gorong-gorong terutama dengan datangnya musim penghujan menjadi isu strategis karena hampir seluruhnya dalam Kota Samarinda terdapat titik-titik genangan air yang dapat menimbulkan terjadinya bencana banjir.

Samarinda selain sebagai Ibukota, Kota Samarinda juga Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda saat ini tengah berkembang dengan pesat, namun di tengah perkembangan ini Kota Samarinda masih selalu didera dengan permasalahan banjir. Fenomena banjir yang terjadi di Kota Samarinda tidak saja terjadi pada saat musim penghujan namun pada saat terjadi hujan dengan durasi 3 jam saja sudah dapat mengakibatkan banjir, seperti yang terjadi pada Jalan Pramuka, Simpang Empat Sempaja Selatan, Jalan PM. Noor, Jalan Antasari, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Panjaitan<sup>1</sup>, kondisi tersebut sangat memprihatinkan warga Kota Samarinda, mengganggu aktivitas masyarakat maupun pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaan proyek<sup>2</sup>.

1 <http://www.tribunnews.com/regional/2013/02/10/banjir-kembali-rendam-samarinda>

2 <https://kaltim.antaranews.com/berita/5858/pspkt-banjir-di-samarinda-disebabkan-tiga-faktor>

Bencana banjir bukan hanya merendam perumahan dan pemukiman juga dapat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan bisa menelan korban jiwa, kerugian akan semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu bahkan terhentinya. Hal ini tentu menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah di tingkat pusat maupun instansi pelaksana di daerah, mengingat fungsi utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Samarinda dilihat dari geografi memiliki luas wilayah 718 kilometer persegi, di antaranya dengan luas 180.000 meter persegi merupakan daerah resapan air menjadikan Kota Samarinda berpotensi menimbulkan banjir atau rawan banjir.

Dilihat dari kondisi hidrologi Kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS). Salah satu dari anak sungai ini adalah Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218,80 km, di mana sampai saat ini di kiri kanan Sungai Karang Mumus dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Samarinda sebagai tempat pemukiman, tempat mandi, cuci dan membuang sampah, kondisi ini memperburuk Kota Samarinda menjadi rawan banjir.

Dilihat dari tata ruang, perubahan tata ruang terjadi akibat perilaku manusia yang membangun perumahan di daerah resapan air bahkan pembangunan stadion sempaja samarinda tanpa memerhatikan faktor ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah sekitarnya seperti ketersediaan saluran maupun fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan, namun upaya tersebut belum optimal dalam mengatasi masalah banjir. Upaya

tersebut berupa pemeliharaan saluran drainase kota, pembenahan sungai-sungai yang melintasi kota, berbagai studi terkait pengendalian banjir kota, pembangunan sarana pengendali banjir serta beberapa aturan telah dikeluarkan untuk pengendalian banjir.

Upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam mengendalikan banjir di Kota Samarinda, namun permasalahan banjir belum teratasi hingga saat ini karena masih ditemukannya titik-titik genangan air di beberapa ruas jalan Kota Samarinda ketika musim penghujan datang.

Peristiwa banjir di Kota Samarinda ini disebabkan bangunan fisik pengendalian banjir seperti drainase, gorong-gorong, saluran air yang ada di pemukiman penduduk seperti got atau selokan tidak mampu menyalurkan air hujan dengan baik. Kenyataan ini dalam kondisi normal seharusnya tidak terjadi apabila saluran air yang ada terintegrasi dengan baik, mengalir dengan lancar mulai dari selokan atau got, drainase, gorong-gorong, Sungai Karang Mumus terus mengalir ke Sungai Mahakam. Curah hujan yang mendera Kota Samarinda terjadi berulang-ulang dan manusia sehingga kondisi real terhadap pengendalian banjir hendaknya menjadi perhatian Aparat untuk lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendalian banjir untuk menghindari dampak bencana.

Dengan memerhatikan dan mengamati kondisi alam, bangunan fisik pengendalian banjir serta akibat bencana banjir memberikan gambaran beberapa hal sebagai berikut.

1. Sungai Karang Mumus yang semakin dangkal menyebabkan aliran air dari drainase-drainase mengalir lamban.

2. Selokan atau got yang ada di pemukiman penduduk dengan dimensi yang sempit terhalang dengan sampah yang berhamburan sehingga air tidak mengalir dengan lancar.
3. Drainase yang buruk dengan dimensi yang sempit kondisinya semakin dangkal menyebabkan air meluap sehingga terjadilah genangan air di beberapa ruas jalan Kota Samarinda.

Atas dasar pengamatan tersebut di atas melalui program/kegiatan pembangunan fisik pengendalian banjir pada tahun yang akan datang sudah seharusnya berdasarkan kepada Skala prioritas terhadap kondisi real yang terjadi di lapangan, serta mempertimbangkan dengan serius rekomendasi dan partisipasi berbagai pihak tertanggal 1 April 2014 seperti yang tercantum di bawah ini :

1. Keberlanjutan implementasi program (Normalisasi Sungai Karang Mumus dan Waduk Benanga).
2. Peninjauan kembali *masterplan* drainase Kota Samarinda.
3. Penuntasan pembebasan lahan dan permasalahan sosial.
4. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan pasarana pengendalian banjir.
5. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan hingga implementasi program.<sup>3</sup>

Dalam mengatasi banjir di Kota Samarinda harus direncanakan sedemikian rupa dengan itu perlu dibuat suatu Rencana Strategis (Renstra) yang lebih fleksibel, mampu mengatasi banjir. Rencana strategis ini perlu difokuskan pada sektor-sektor yang strategis dalam

3 Sumber: [bappeda.kaltimprov.go.id](http://bappeda.kaltimprov.go.id).

arti perlu membuat suatu prioritas yang sesuai dengan kondisi daerah.

Rencana strategis yang dibuat oleh daerah seharusnya menempatkan kinerja yang berdampak dan bermanfaat yang dihasilkannya sesuai keberadaan daerah. Sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka rencana strategis yang dibuat haruslah transparan untuk kepentingan akuntabilitas, dan harus melibatkan *stakeholder* yang ada di daerah.

Pada penelitian sebelumnya telah dibahas mengenai permasalahan banjir yaitu Rafiq<sup>4</sup> dalam tesisnya yang berjudul studi tentang kebencanaan dalam penanggulangan banjir di Kota Samarinda dalam penelitiannya hanya sekedar mengetahui serta menganalisa gambaran pelaksanaan program kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir kemudian Sodik<sup>5</sup> dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul upaya Pemerintah dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda juga hanya ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah serta kendala yang dihadapi.

Untuk itu Peneliti dalam tulisannya ingin bukan hanya sekedar mengetahui saja tetapi merumuskan strategi mengenai pengendalian banjir pada Dinas Bina Marga dan Pengairan di Kota Samarinda, Peneliti di sini berharap dapat memberikan

4 Rafiq, A. 2014. *Studi tentang Kebencanaan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur*. Universitas Mulawarman.

5 Sodik, Fajar. 2015. *Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Banjir di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman

manfaat atau masukan bagi pemerintah Kota Samarinda untuk dapat menentukan alternatif penyelesaian masalah banjir.

Dengan menggunakan strategi, suatu organisasi diharapkan dapat membuat keputusan strategis dengan membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, serta menciptakan prioritas dan memecahkan masalah utama organisasi.

Pemerintah Kota Samarinda sudah seharusnya mampu berpikir dan bertindak secara strategis dengan membuat suatu perencanaan yang strategis dan mampu mengakomodir seluruh aspek yang terkait pengendalian banjir di Kota Samarinda agar masalah banjir dapat diatasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi terhadap strategi pengendalian banjir di Kota Samarinda sebagai berikut.

1. Masih sering terjadinya banjir dan cakupan wilayah banjir masih tersebar di seluruh Kota Samarinda dan masih adanya korban dari bencana banjir.
2. Curah hujan yang cukup tinggi dan berpotensi banjir.
3. Sungai alam tergerogoti fungsi pemukiman dan atau sampah yang menyumbat drainase.
4. Pelaksanaan perbaikan masih terkendala proses penyiapan pembebasan lahan untuk *folder* dan kanal.
5. Kurangnya Anggaran mempengaruhi cepat lambatnya mengatasi masalah banjir di Kota Samarinda.
6. Belum adanya strategi yang efektif dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengendalian banjir di Kota Samarinda. Tujuan diadakannya penelitian tentang strategi pengendalian banjir pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda adalah :

1. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun kondisi eksternal berupa peluang dan tantangan yang mempengaruhi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda.
2. Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda.
3. Untuk merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan banjir di Kota Samarinda.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Manajemen Bencana

Definisi Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut.

**Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, *tentang Penanggulangan Bencana*

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. **Banjir** adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Definisi manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Kegiatan Manajemen Bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-disiplin. Peraturan perundang-undangan lintas-sektor. Dengan kalimat lain, sesungguhnya kegiatan manajemen bencana dilaksanakan oleh sektor-sektor, sedangkan kegiatan dari lembaga kebencanaan sebagian besar adalah mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh sektor.

Berbagai pihak yang terlibat dalam Manajemen Bencana harus saling bekerja sama dan menyamakan persepsi tentang bencana dan Manajemen Bencana melalui sebuah sistem/aturan

main yang disepakati yaitu Sistem Manajemen Bencana pula program/kegiatan dilaksanakan pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja oleh para pemangku kepentingan secara periodik atau sebagai reaksi/respons terhadap kejadian bencana akan menjadi sia-sia karena bencana akan terus terjadi secara berulang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas/prinsip-prinsip utama: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut. cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitran, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-proselitisi<sup>7</sup>.

### Pengendalian Banjir

Menurut Terry dalam Hasibuan<sup>8</sup>, mengatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai Proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksana, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

7 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, *tentang Penanggulangan Bencana*.

8 Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.242.

Selain itu menurut Horalid dalam Hasibuan, pengendalian yaitu Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.<sup>9</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengatakan bahwa Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi disuatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air disuatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. “Sebuah banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan”.

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah pengukuran terhadap pelaksanaan kerja kemudian menilai pelaksanaan tersebut jika terdapat kesalahan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Berdasarkan dari pengertian pengendalian tersebut di atas dan penjelasan kamus bahasa Indonesia tentang banjir maka pengendalian banjir dimaksudkan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan suatu organisasi secara bertahap dalam suatu wilayah agar terhindar dari bencana banjir atau bebas banjir.

Berdasarkan perkembangan Kota Samarinda dan analisis penyebab banjir, konsep pengendalian banjir Kota Samarinda dibagi dalam tiga bagian kegiatan yaitu :

1. Konsep pengendalian banjir banjir daerah hulu, yaitu dengan memperbaiki kondisi DAS yang rusak dan meningkatkan resistensi

DAS untuk reduksi potensi banjir di daerah hulu. Konsep ini dapat dilakukan dengan adanya konservasi DAS, pengembangan/revitalisasi tampungan alam (saat ini berupa rawa dan cekungan alam lainnya) dan tampungan buatan (waduk/lembung). Konsep ini diterapkan dalam *Masterplan* Pengendalian Banjir Kota Samarinda dengan pengembangan beberapa bendungan di DAS Karangmumus seperti Bendungan Karangmumus Atas, Pampang Kanan, Pampang Kiri, Lubang Patung, Bendali Muang, Bendali Sempaja. Untuk Sub DAS karang Asam Kecil dengan terbangunnya Bendali HM. Ardans. Sub DAS Loa Janan dengan Bendunga Tani Aman.

2. Konsep pengendalian banjir daerah tengah, yaitu mereduksi banjir (mengurangi limpasan permukaan) dengan minimalisasi perubahan tata guna lahan, termasuk penertiban pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota Samarinda. Selain Konservasi lahan (struktural dan non struktural) juga dilakukan dengan normalisasi saluran/sungai. Konsep ini dilakukan dengan mengembangkan berbagai rencana kolamretensi seperti di DAS Karangmumus dengan kolam retensi Gunung Lingai, kolam retensi Bengkuring, kolam retensi Damanhuri dan beberapa kolam retensi di DAS Karangasam Kecil (2 Lokasi), Di Sub DAS Loa Janan kolam retensi Loa Hui dan Sub DAS Rapak Dalam dengan kolam retensi juga dilakukan normalisasi sungai-sungai alam yang ada di Kota Samarinda.

3. Konsep pengendalian banjir di daerah hilir adalah dengan memperlancar

<sup>9</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Ibid.*, hal.41.

aliran drainase yang ada yaitu peningkatan kapasitas air saluran drainase dan proteksi aliran di saluran dari pengaruh pasang air Sungai Mahakam.

Selain konsep pengendalian berdasarkan DAS (Hulu, tengah, Hilir) konsep pengendalian banjir juga dilakukan dengan melalui pendekatan sosial (terhadap masalah banjir dan sosialisasi), kelembagaan (melibatkan lembaga kemasyarakatan, instansi swasta dan instansi pemerintah) dan regulasi (penegakan peraturan).

### Manajemen Strategik

Konsep strategi biasanya digunakan dalam istilah kemiliteran, pada zaman kerajaan istilah strategi sering digunakan dalam situasi persiapan untuk peperangan/pertempuran sehingga hal tersebut merupakan suatu bagian dari perencanaan perang pada zaman sekarang ini hal serupa sering digunakan dalam dunia kemiliteran, bisnis bahkan olahraga. Namun konsep strategi lebih mengental pada dunia militer sebagaimana yang dikemukakan oleh Amstrong sebagai berikut.

Strategi sesungguhnya merupakan pengertian dalam bidang militer, didefinisikan dalam *Oxford English Dictionary* sebagai: *The art of commander in chief, the art of projecting and directing the larger military movements and operations if a campaign* (seni seorang panglima tertinggi, seni memproyeksikan dan mengatur gerakan militer yang lebih besar serta operasi-operasi kampanye)<sup>10</sup>.

10 Armstrong, Michael. 2003. *Managing People (Mengelola Karyawan)*, Edisi Terjemahan. Jakarta: Gramedia, hal.37.

Strategi adalah merupakan seni seorang pimpinan dalam mengatur dan memproyeksikan kekuatan. Sejalan dengan itu Momigliano dalam saluso (mengungkapkan bahwa istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, atau dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani kuno sering diartikan sebagai perwira Negara (*state officer*) dengan fungsi yang cukup luas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal adanya *Board of ten strategy* di Athena, mewakili sepuluh suku di Yunani. Hingga abad ke-5, kekuasaan politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas. Lama-kelamaan strategi mempunyai pengertian baru.

Perkembangan konsep strategi mengalami kemajuan sehingga bukan saja dikenal dalam dunia kemiliteran bahkan sudah diterjemahkan dalam setiap perencanaan strategik juga kerap ditemukan dalam politik, ekonomi, olahraga dan lain sebagainya. Konsep strategi merupakan sebuah konsep perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap manajer. Strategi merupakan terminology yang digunakan luas oleh organisasi laba (*profit oriented*), yang kemudian dalam pengembangannya digunakan pula oleh organisasi publik lainnya.

Kegunaan strategi adalah pengendalian sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi, tanpa strategi sebuah organisasi akan mengalami sebuah permasalahan yang pelik baik dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal terutama pada pesaing organisasi tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Bryson bahwa :

Strategi merupakan salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta

menolong organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar.<sup>11</sup>

Definisi strategi antara lain dikemukakan oleh Chandler dalam Rangkuti bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai penempatan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>12</sup> Sehingga strategi sering digunakan dalam perencanaan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan/ditentukan. Lebih lanjut Amstrong<sup>13</sup> mengatakan bahwa strategi mungkin dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai cita-cita organisasi kemana akan pergi dan secara luas bagaimana mencapai arah yang dituju.

Beberapa definisi di atas mengenai strategi maka secara jelas dapat ditarik benang merahnya bahwa rumusan strategi menyinggung bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungannya. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan memerhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal organisasi.

11 Bryson, M. 2008. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

12 Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal. 3-4.

13 Armstrong, Michael. 2003. *Op. Cit.*, hal. 38.

Hax dan Majluf dalam Salusu<sup>14</sup> mencoba melihat secara komprehensif tentang strategi sebagai berikut;

1. Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan intergal;
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti oleh organisasi;
4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberi respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, kekuatan serta kelemahannya;
5. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Selanjutnya Amstrong<sup>15</sup> mengatakan bahwa dalam bisnis ada tiga konsep utama strategi yakni keunggulan kompetitif, kapabilitas khusus dan kesesuaian strategik, maksud dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut.

- a) Keunggulan kompetitif diarahkan pada kegunaan diferensiasi di mana terjadi persaingan dengan mengandalkan tiga strategi praktis yakni kreativitas, kualitas dan manajemen biaya.
- b) Kapabilitas khusus lebih diarahkan pada penciptaan inovasi yang khusus dan unik yang dapat dilakukan oleh organisasi.
- c) Konsep kesesuaian strategi menyatakan bahwa untuk memaksimalkan

14 Salusu, J. 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Profit*, Gramedia, Jakarta, hal. 100.

15 Armstrong, Michael. 2003. *Op. Cit.* hal. 39.

<p>keunggulan kompetatif perusahaan, maka harus menyesuaikan kapabilitas dan sumber daya yang ada dengan peluang yang tersedia di dalam lingkungan eksternal.</p> <p>Ditambahkan lagi oleh Mulyadi yang mengemukakan bahwa :</p> <p>Ada berbagai tipe strategi yang dirumuskan: (1) <i>Grand Strategy</i> yaitu usaha secara terus menerus dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, (2) <i>Generic Strategy</i>, yaitu usaha untuk mewujudkan biaya total terendah (<i>low cost</i>) atau diferensiasi luas (<i>broad differentiation</i>) dengan fokus pasar luas atau sempit, dan (3) <i>Value Based strategy</i>, yaitu usaha untuk megrhkan manajer agar bertanggung jawab atas: (a) memberikan <i>value</i> terbaik untuk pemenuhan kebutuhan <i>costumer</i>, dan (b) penciptaan <i>system</i> strategi untuk acara berkelanjutan melakukan <i>improvement</i> terhadap <i>value</i> tersebut dan untuk menunaikan kewajiban organisasi<sup>16</sup>.</p> <p>Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi organisasi badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Konsep strategi itu sendiri bermakna pada alokasi sumber daya dalam rangka mencapai berbagai sasarannya, dilain hal disebutkan bahwa pengertian strategi adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan.</p>	<p>Kemudian konsep ini berkembang menjadi alat pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.</p> <p>Strategi dalam pandangan pelayanan publik mengandung makna suatu tujuan jangka panjang ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kepuasan <i>costumer</i> terhadap kualitas pelayanan yang dikembangkan melalui penciptaan strategi yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka memenangkan perhatian dan kepuasan pelanggan. Sedangkan pada sektor pemerintahan khususnya yang menyangkut dengan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka konsep strategi itu sendiri lebih diarahkan pada upaya pembuatan kebijakan publik dalam mengembangkan program peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan bagian visi, misi, tujuan, sasaran arah kebijakan, program dan keiatan dari organisasi pemerintahan yang tertuang dalam dokumen rencana strategi (<i>renstra</i>) yang disusun oleh pemerintah.</p> <p>Keputusan strategi sangat diperlukan dalam menetapkan strategi yang akan digunakan pada perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sangat menentukan sukses tidaknya suatu tujuan itu yang dicapai dengan hasil hemilang atau tidak.</p> <p>Hetten and Hetten dalam Salusu memberikan beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi yang dibuat sehingga ia bisa sukses :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya, jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan masyarakat dalam</li> </ol>
<p>16 Mulyadi, 2001, <i>Sistem Perencanaan &amp; Pengendalian Manajemen</i>, Salemba Empat, Jakarta, hal. 41.</p>	

<p>lingkungan yang memberikan peluang untuk bergerak maju.</p> <p>2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain, jangan bertentangan atau bahkan bertolakbelakang.</p> <p>3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan yang tidak sehat antar berbagai unit kerja dalam organisasi seringkali mengklaim sumber dayanya, memberikannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.</p> <p>4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.</p> <p>5. Sumber daya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin ada harus membuat sesuatu memang layak dan dapat dilaksanakan.</p> <p>6. Strategi itu hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung risiko, tetapi haruslah berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke dalam lubang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi haruslah dapat dikontrol.</p>	<p>7. Strategi hendaknya disusun atas landasan keberhasilan telah dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan.</p> <p>8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditempatkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi<sup>17</sup>.</p> <p><b>METODE PENELITIAN</b></p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik <i>purposive sampling</i> dan <i>snowball sampling</i>. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis SWOT.</p> <p><b>PEMBAHASAN</b></p> <p>Secara yuridis Kota Samarinda terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Dengan luas wilayah 718 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 805.688 jiwa pada tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda), Samarinda terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 0°21'81"–1°09'16" LS dan 116°15'16"–117°24'16" BT. Kota Samarinda memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Utara: Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara</li> <li>Selatan: Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara</li> </ol> <p><sup>17</sup> Salusu, J. 1996, <i>Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Profit</i>, Gramedia, Jakarta, hal.108.</p>
--	--

<p>c. Barat: Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara</p>	<p>7. Kecamatan Samarinda Kota mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 11.12 Km<sup>2</sup></p>
<p>d. Timur: Kecamatan Muara Badak, Anggana, dan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>8. Kecamatan Loa Janan Ilir mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 26.13 Km<sup>2</sup></p>
<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 3364, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah ± 718 Km<sup>2</sup> dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir, maka wilayah Kota Samarinda saat ini terbagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan dan 53 kelurahan yang terdiri dari:</p>	<p>9. Kecamatan Sungai Pinang mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 34.16 Km<sup>2</sup></p>
	<p>10. Kecamatan Sambutan mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 100.95 Km<sup>2</sup></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Samarinda Ilir mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 17.18 Km<sup>2</sup></li> <li>2. Kecamatan Samarinda Utara mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 229.50 Km<sup>2</sup></li> <li>3. Kecamatan Samarinda Ulu mengkoordinasi 8 Kelurahan dengan luas wilayah 22.12 Km<sup>2</sup></li> <li>4. Kecamatan Sungai Kunjang mengkoordinasi 7 Kelurahan dengan luas wilayah 43.04 Km<sup>2</sup></li> <li>5. Kecamatan Samarinda Seberang mengkoordinasi 3 Kelurahan dengan luas wilayah 12.49 Km<sup>2</sup></li> <li>6. Kecamatan Palaran mengkoordinasi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 221.28 Km<sup>2</sup></li> </ol>	<p>Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota Samarinda Daerah Kota Samarinda.</p>
	<p>Dasar penjabaran tugas dan dan tata kerja struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 23 Tahun 2008, tanggal 14 Oktober 2008 tentang “Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda”.</p>
	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang “Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda”. Bahwa tugas pokok dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan</p>

pengelolaan, pengusahaan, pengawasan dan pengendalian penetapan kebijakan pola, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber daya air, pengaturan dan perumusan kebinamargaan, penyelesaian masalah permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir, pembinaan dan pemberdayaan sistem informasi jasa konstruksi jalan dan jembatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi yang searah dengan kebijakan umum daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda mempunyai tugas sebagaimana yang diatur pada pasal 517 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 23 Tahun 2008 Sebagai berikut <sup>18</sup>:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional bina marga dan pengairan dalam upaya pembinaan, pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi penyelenggaraan kegiatan urusan bina marga dan pengairan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umumnya khususnya urusan bina marga dan pengairan serta pelayanan umum pengaturan dan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis proses perizinan melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas penyediaan dan pembentukan, penggunaan dan pengurusan, konservasi sumber

daya air dan pengendalian daya rusak air, perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, operasional sistem drainase dan pematuan genangan serta pengendalian banjir sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang searah kebijakan umum daerah.

3. Penyelenggaraan penerapan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu atas penyediaan, pembentukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air, air tanah, pembangunan pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran, pengembangan dan atau saluran irigasi, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan, perizinan usaha jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai standar pelayanan minimal.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pembinaan pengelolaan pengurusan dan pengawasan dan pengendalian operasional sumber daya air, pembentukan komisi irigasi, fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

### **Strategi Pengendalian Banjir di Kota Samarinda**

Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Internal berupa kekuatan terdiri dari :

- a. Komitmen Pimpinan

<sup>18</sup> Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008, *tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Tata Kerja Struktur Organisasi*, Dinas Bina Marga dan Pengairan.

<p>b. Tersedianya Anggaran APBD, Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi.</p> <p>c. Adanya tupoksi terhadap pengendalian banjir. Adapun kelemahannya terdiri dari:</p> <p>a. Banyaknya saluran-saluran drainase yang tidak berfungsi (buntu).</p> <p>b. Kurangnya daerah resapan air diakibatkan pembangunan yang terus menerus.</p> <p>c. Masih banyaknya kolam retensi yang belum bisa difungsikan.</p> <p>Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi eksternal berupa peluang terdiri dari:</p> <p>a. Samarinda Ibukota Provinsi dengan luas yang memadai,</p> <p>b. Samarinda dilalui oleh Sungai Mahakam dan 20 anak sungai (DAS)</p> <p>c. Adanya Sungai Karang Mumus yang membelah di tengah Kota Samarinda sehingga dapat berfungsi sebagai kanal</p> <p>Adapun ancaman terdiri dari :</p> <p>a. Adanya titik-titik genangan air di beberapa ruas jalan kota ketika musim penghujan tiba.</p> <p>b. Tingkat pencemaran sungai yang melampaui batas.</p> <p>c. Pasang surut muka air Mahakam serta curah hujan yang tinggi serta pemukiman padat penduduk yang menduduki bantaran sungai.</p> <p>Rumusan isu-isu strategis dalam rangka pengendalian banjir di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut.</p> <p>a) Membangun komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menuju Samarinda bebas banjir.</p> <p>b) Revitalisasi dan merelokasi pemukiman bantaran Sungai Karang Mumus.</p>	<p>c) Diperlukannya adanya keberlanjutan implementasi program pengendalian banjir.</p> <p>d) Pembangunan normalisasi saluran drainase (<i>Review Design</i>) dalam Kota Samarinda</p> <p><b>SIMPULAN DAN SARAN</b></p> <p><b>Simpulan</b></p> <p>Hasil penelitian tentang Strategi Pengendalian Banjir Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda Strategi keberlanjutan implementasi program pengendalian banjir.</p> <p>Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi internal berupa kekuatan terdiri dari :</p> <p>a. Komitmen Pimpinan</p> <p>b. Tersedianya Anggaran APBD, Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi</p> <p>c. Adanya tupoksi terhadap pengendalian banjir</p> <p>Adapun kelemahannya terdiri dari:</p> <p>a. Banyaknya saluran-saluran drainase yang tidak berfungsi (buntu)</p> <p>b. Kurangnya daerah resapan air diakibatkan pembangunan yang terus menerus</p> <p>c. Masih banyaknya Kolam retensi yang belum bisa difungsikan.</p> <p>Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi eksternal berupa peluang terdiri dari</p> <p>a. Samarinda Ibukota Provinsi dengan luas yang memadai, Samarinda dilalui oleh Sungai Mahakam dan 20 anak sungai (DAS)</p> <p>b. Samarinda dilalui oleh Sungai Mahakam dan 20 anak sungai (DAS)</p> <p>c. Adanya Sungai Karang Mumus yang membelah di tengah Kota Samarinda</p>
--	--

<p>sehingga dapat berfungsi sebagai Kanal</p> <p>Adapun ancaman terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Titik-titik genangan air Di beberapa ruas jalan kota ketika musim penghujan tiba</li> <li>Tingkat pencemaran sungai yang melampaui batas</li> <li>Pasang surut muka air mahakam serta curah hujan yang tinggi serta pemukiman padat penduduk yang menduduki bantaran sungai</li> </ol> <p>Rumusan isu-isu strategis dalam rangka pengendalian banjir di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Strategi membangun komitmen Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.</li> <li>Strategi revitalisasi dan merelokasi pemukiman bantaran sungai karang mumus.</li> <li>Strategi keberlanjutan implementasi program pengendalian banjir.</li> <li>Strategi pembangunan Normalisasi saluran drainase (<i>Review Design</i>) dalam Kota Samarinda</li> </ol> <p><b>Saran</b></p> <p>Demi terwujudnya Kota Samarinda bebas banjir, maka Penulis memberikan saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang program pengendalian banjir Kota Samarinda.</li> <li>Menyusun Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam pengendalian banjir untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian banjir Kota Samarinda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan Isu Strategis sesuai dengan Peraturan Daerah Pengendalian Banjir Kota Samarinda demi terwujudnya Kota Samarinda bebas banjir.</li> </ol> <p><b>DAFTAR PUSTAKA</b></p> <p>Armstrong, Michael. 2003. <i>Managing People (Mengelola Karyawan)</i>, Edisi Terjemahan. Jakarta: Gramedia</p> <p>Bryson, M. 2008. <i>Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial</i>. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.</p> <p>Hasibuan, Malayu S.P. 2005. <i>Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah</i>. Jakarta: PT Bumi Aksara.</p> <p>Mulyadi, 2001, <i>Sistem Perencanaan &amp; Pengendalian Manajemen</i>, Salemba Empat, Jakarta.</p> <p>Rangkuti, F. 2008. <i>Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis</i>. Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.</p> <p>Salusu, J. 1996, <i>Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Profit</i>, Gramedia, Jakarta.</p> <p><b>Peraturan Perundang-Undangan</b></p> <p>Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, <i>tentang Penanggulangan Bencana</i>.</p> <p>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, <i>tentang Pemerintahan Daerah</i>.</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, <i>tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda</i>.</p> <p>Keputusan WaliKota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008, <i>tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Tata Kerja Struktur Organisasi</i>, Dinas Bina Marga dan Pengairan.</p> <p>Pemerintah Kota Samarinda, <i>Dinas Bina Marga dan Pengairan, Perencanaan Strategik (Renstra) Tahun 2011-2015</i>.</p>
--	--

**Karya Imliah /Tesis**

Rafiq, A. 2014. *Studi tentang Kebencanaan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur*. Universitas Mulawarman.

Sodik, Fajar. 2015. *Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Banjir di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman.

Koran Tribunnews dan Kaltimpost.